



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SULAWESI BARAT**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI SULAWESI BARAT
17-21 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk melakukan:

1. Mendapatkan informasi secara langsung terkait pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam Padi, penangkapan ikan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengelolaan sampah, serta permasalahan perberasan dan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pembangunan Pertanian, Pangan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kelautan dan Perikanan yang didanai oleh APBN, APBD, atau sumber-sumber anggaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Barat; serta
4. Mendapatkan data dan informasi sebagai bahan pembahasan dengan Mitra Komisi IV DPR serta menyerap aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah, termasuk meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI di masa persidangan yang akan datang.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Bapak Dr. H. Suhardi Duka, M.M. dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan pada tanggal 17-21 Juli 2024, dengan objek kunjungan:

1. Lokasi Pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam Padi di Kabupaten Mamuju;
2. Rumah Jabatan Bupati Mamuju, Sapota, Jl. Yos Sudarso No. 51, Binanga, Kabupaten Mamuju;
3. Tempat Pengumpulan Sampah Adi-adi, Botteng Utara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

B. GAMBARAN UMUM

1. Profil Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju adalah sebuah kabupaten dan juga merupakan ibu kota dari provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Suku asli wilayah ini adalah Suku Mandar yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat. Wilayah pedalaman Kabupaten Mamuju dihuni oleh Suku Kalumpang yang wilayahnya terdapat salah satu situs neolitik tertua di Indonesia, dan merupakan peninggalan Orang Austronesia yang disebut sebagai nenek moyang Bangsa Indonesia. Akhir tahun 2020, jumlah penduduk Mamuju sebanyak 278.764 jiwa, dan pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 283.282 jiwa.

Kabupaten Mamuju juga memiliki wilayah kepulauan yaitu Kepulauan Balabalakang yang secara geografis lebih dekat dengan Pulau Kalimantan sehingga pernah diklaim oleh Kalimantan Timur.

Mamuju menjadi satu dari tujuh ibu kota provinsi di Indonesia yang belum bersatus kota otonom, selain Manokwari di Papua Barat, Sofifi di Maluku Utara, Merauke di Papua Selatan, Nabire di Papua Tengah, Tanjung Selor di Kalimantan Utara, dan Wamena di Papua Pegunungan.

Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan ada Teluk Lebani. Secara astronomis, wilayah Mamuju berada di antara 2°8'24" LS - 2°57'46" LS dan 118°45'26" BT - 119°47'48" BT.

Topografi wilayah Kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut (mdpl), dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju di antaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparia, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda. Secara geologi, wilayah Kota Mamuju tersusun oleh batuan Formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batupasir dan batu lempung. Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema terusun atas Formasi Mamuju berupa Napal, kalkerenit dan batugamping koral bersisipkan tuf dan batupasir. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 - 34 °C.

Batas Wilayah Kota Mamuju, antara lain:

- Utara : Kabupaten Mamuju Tengah
- Timur : Sulawesi Selatan
- Selatan : Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa
- Barat : Selat Makassar

Wilayah Mamuju berdasarkan klasifikasi iklim Koppen memiliki iklim hutan hujan tropis (Af). Curah hujan di wilayah Mamuju cenderung tinggi sepanjang tahun dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 mm per tahun. Jumlah hari hujan di wilayah ini berkisar antara 120 - 180 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Mamuju berkisar pada 22° - 33 °C. Tingkat kelembapan relatif di Mamuju adalah ±82%.

2. Program Perluasan Areal Tanam Padi

Padi adalah sumber pangan yang sangat penting karena merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar bagi manusia, sehingga memiliki sifat strategis dan penting dalam pembangunan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk negara wajib mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Pangan harus

senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam setahun terakhir ini, kita ketahui bahwa beras menjadi permasalahan utama karena harganya mengalami peningkatan dan ketersediaannya mengalami keterbatasan, Stabilitas pangan dan harga belum tercipta dengan baik di Indonesia jumlah produksi produk pertanian dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi stok pangan dalam negeri, sehingga dalam dua tahun belakangan ini, Pemerintah terpaksa memenuhi ketersediaan pangan dengan bergantung pada impor beras dari beberapa negara tetangga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Pemerintah menyikapi kondisi perberasan nasional saat ini berupaya meningkatkan produksi beras dengan melakukan Program Perluasan Areal Tanam Padi. Sebagai negara agraris yang kaya akan lahan subur dan iklim tropis, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertaniannya, khususnya dalam produksi padi.

3. Penangkapan Ikan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan ekosistem kelautan yang berlimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi modal dasar yang harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia tersebar di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Potensi tersebut juga berada di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Majene, berdasarkan data BPS tahun 2023 perproduksi perikanan tangkap kabupaten Majene sebesar 9.435,9 ton. Sektor perikanan menjadi salah satu mata pencaharian yang ditekuni masyarakat Majene.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks baik permasalahan dari sisi penangkapan maupun pengolahan hasil kelautan dan perikanan, misalnya seperti IUU Fishing, penangkapan ikan secara berlebihan, abrasi pantai, degradasi habitat laut, dan kondisi ekonomi nelayan yang tidak stabil.

Kemudian kita juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan akan teknologi modern dalam pengelolaan perikanan. ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah hasil tangkapan.

Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengatasi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh para nelayan. Negara harus dapat memastikan bahwa para nelayan memiliki akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya yang diperlukan, serta mendukung mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapinya.

4. Pengelolaan Sampah

Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan (estetika). Tumpukan ongkongan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Adapun, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh tingginya kelahiran tetapi juga adanya urbanisasi masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi akan mengakibatkan tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga.

Kepedulian masyarakat khususnya rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran

masyarakat atas dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menjaga lingkungan hidup diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan hidup, dengan disertai upaya sosialisasi kepada masyarakat.

5. Permasalahan Perberasan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Dalam rangka memenuhi stok pangan nasional di masa kini dan masa mendatang, Bulog telah melakukan berbagai upaya penyerapan gabah di sentra-sentra padi seperti di selirih wilayah Indonesia. Pemerintah telah melakukan penyerapan sampai dengan 30 ribu ton setara GKP (gabah kering panen) per harinya. Upaya pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah dengan menggunakan produksi dari dalam negeri adalah dalam rangka meminimalisir adanya impor. Selain itu, Bulog secara aktif melakukan pemantauan kepada petani yang akan panen raya, dan Bulog berkomitmen menjalankan sinergitas dan koordinasi dengan para pelaku usaha perberasan guna pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyerapan hasil produksi gabah dan beras. Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui pemenuhan stok beras nasional yang bersumber dari produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Pupuk bersubsidi yang diperuntukan bagi petani tanaman pangan, berupa padi, jagung, dan kedelai, serta tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu juga diperuntukkan bagi petani perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi dengan luas lahan maksimal 2 ha, termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran subsidi pupuk di tahun 2024 sebesar Rp26 triliun dirasa masih tidak cukup untuk mengatasi langkanya pupuk subsidi. Karena baru memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai Rp70 triliun. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi benar-benar memantau dan berkordinasi dengan agen/kios-kios atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) agar tidak terjadi pemberian ganda dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya

pemutakhiran data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sangat diperlukan oleh Pemerintah karena untuk menentukan distribusi pupuk bersubsidi ke petani agar tepat sasaran dan merata

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam Padi

a. Paparan Pemerintah Kabupaten Mamuju

- 1) Kabupaten Mamuju adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang kaya akan potensi pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama adalah tanaman padi dan jagung. Oleh sebab itu orientasi pembangunan yang dilakukan masih dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, disusul sektor perikanan dan kelautan yang tersimpan sebagai kekayaan alam Bumi Manakarra.
- 2) Kabupaten Mamuju selalu mendapatkan support yang sangat luar biasa dari Komisi IV DPR RI melalui pengembangan program pertanian dan perikanan, dengan ragam bantuan yang telah dirasakan oleh hampir seluruh kelompok tani di Kabupaten Mamuju, mulai dari penerapan teknologi pertanian, sampai pada alat dan mesin pertanian maupun pengembangan sumber daya manusia para petani yang didorong menjadi Petani KEREN, dengan modernisasi yang terus mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI, sehingga sektor pertanian saat ini telah mulai mengalami kemajuan, dan Pemerintah Kabupaten dapat mulai berkonsentrasi pada sektor pembangunan lain dalam rangka mempercepat transformasi kemajuan di Kabupaten Mamuju.
- 3) Pemerintah Kabupaten Mamuju mengharapkan agar kehadiran sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI dalam kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik kali ini, dapat semakin menambah dukungan kebijakan untuk dapat diimplementasikan di Kabupaten Mamuju, sehingga Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat yang digadang sebagai daerah penyanggah Ibu Kota Negara, benar-benar mampu diwujudkan, dan

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama para petani.

- 4) Harus diakui, bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan, antara lain dukungan sarana irigasi yang masih terbatas, serta penerapan modernisasi pertanian yang juga belum begitu optimal. Diharapkan adanya kolaborasi antara semua instansi terkait dan dukungan dari masyarakat, untuk dapat bersama-sama dalam mengintervensi pembangunan sektor pertanian, demi mendorong kemajuan sektor lain yang tentunya akan saling mempengaruhi.

b. Penyampaian Informasi Kementerian Pertanian

- 1) Program Kementan Tahun 2024 yang sedang didorong untuk mendukung pemenuhan kebutuhan beras nasional :
 - a) Optimalisasi 400 rb Lahan Rawa di 11 Provinsi di Indonesia dengan memperbaiki saluran irigasi
 - b) Geraman pompanisasi berupa pembaharuan 70 rb unit pompa di seluruh Indonesia, dimana Sulawesi Barat akan mendapat alokasi 735 unit pompa, dan sampai dengansaat ini sudah dibagikan sebanyak 400 unit.
 - c) Program Perluasan Areal Tanam Padi seluas 1 juta hektar, masing-masing 500 rb hektat di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa (termasuk Provinsi Sulawesi Barat), diantaranya perluasan tanaman padi gogo ada lahan sawah tadah hujan dan di lahan sawit.
- 2) Kebutuhan beras nasional adalah sebanyak 2,5 juta ton per bulan (30 juta ton beras per tahun). Sementara saat ini negara baru menyiapkan 31 juta ton beras per tahun (dari sebelumnya dapat disiapkan sebanyak 34 juta ton).
- 3) Jalan satu-satunya yang harus dilakukan adalah melakukan PAT Padi seluas 3 juta hektar, dimana target tahun 2025 adalah seluas. 1 juta hektar.

- 4) Lahan-lahan yang bekum menjadi sawah akan dicetak menjadi areal sawah, yang penting ada sumber airnya. Nanttinya areal tersebut akan dibuatkan saluran irigasi dan jalan usaha taninya. Sebagai catatan, sampai dengan saat ini baru berhasil dicetak seluas 431 ribu hektar dari target 3 juta hektar sawah.
- 5) Silakan sampaikan usulan penambahan areal persawahan di Sulbar, terutama Kabupaten Mamuju. Agar diusulkan Calon Petani Calook Lokasi (CPCL) nya untui mendapatkan bantuan pompa dan benih insitu.

c. Penyampaian Informasi Badan Ketahanan Pangan

Harga jagung nasional adalah sebesar Rp5.000,00/kg. Apabila harga jaging di tingkat petani masih berada dibawah angka Rp5.000,00/kg. Dalam ha ini Badan Ketahanan Pangan mendorong agar Perum Bulog dapat menyerap produksi jagung petani dengan harga Rp5.000,00/kg.

d. Penyampaian Aspirasi Wakil Kelompok Tani

- 1) Petani di Kebaupten Mamuju mengeluhkan rendahnya harga jagung di Tingkat petani, yaitu Rp3.500,00/kg. Petani adanya dukungan kenaikan harga jagung.
- 2) Masih banyak petani yang belum masuk ke dalam daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), sehigga petani masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi.
- 3) Terjadinya pendangkalan bendungan yang menyebabkan berkurangnya volume air dalam bendungan, Petani berharap agar Pemerintah dapat memberikan dukungan/bantuan pengerukan bendungan dalam memecahkan permasalahan pengairan/irigasi di lahan sawah.

e. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Kabupaten Mamuju memiliki 2 (dua) komoditas unggulan di sektor pertanian, yaitu padi dan jagung. Komisi IV DPR RI menilai bahwa pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Mamuju sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan pasokan pupuk yang mencukupi serta hasil panen padi petani yang terserap dengan maksimal oleh Perum

Bulog. Di lain pihak Komisi IV DPR RI melihat permasalahan yang dihadapi oleh para petani jagung, yaitu anjloknya harga jagung di tingkat petani serta rendahnya penyerapan produksi jagung petani oleh Perum Bulog.

Dalam hal ini Komisi IV DPR RI mendorong adanya intervensi dari Perum Bulog agar tidak hanya melakukan penyerapan produk beras petani, namun diharapkan Perum Bulog dapat juga menyerap komoditas jagung yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Mamuju, minimal seharga Rp5.000,00/kg, sebagaimana Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar target Program Perluasan Areal Tanam Padi di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditingkatkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar target pencetakan sawah baru di Provinsi Sulawesi Barat dapat diperluas ditingkatkan, minimal seluas 10.000 hektar.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan fasulitasi alat berat berupa excavator untuk melakukan pengerukan waduk yang mengalami pendangkalan.

2. Diskusi di Rumah Jabatan Bupati Mamuju, Sapota

a. Penyampaian Informasi Kabupaten Mamuju

- 1) Kabupaten Mamuju memiliki keunggulan produk hortikultura, terutama durian (musangking, montong, dan jenis lokal), tanaman pangan berupa padi dan jagung, perikanan, dan tambang (uranium).
- 2) Pemerintah Kabupaten Mamuju saat ini mengenakan kebijakan moratorium pemberian perizinan berusaha pertambangan, termasuk sektor pertambangan strategis di Kabupaten Mamuju.
- 3) Mohon dukungan realiasi propoisa yang akan disampaikan oleh masing-masing pejabat berwenang terkait di Kabupaten Mamuju.
- 4) Saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adi-adi yang berada di Kecamatan Botteng, Kabupaten Mamuju dalam kondisi sudah hampir

penuh, sehingga perlu dilakukan pengembangan/perluasan areal TPA (Zona II).

b. Aspirasi Kelompok Tani Kabupaten Mamuju

- 1) Perlu menumbuhkan Petani Milenial (Petani Muda) baru yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan usaha di bidang pertanian, hortikultura, dan perikanan.
- 2) Petani Milenial perlu dukungan untuk pengembangan produk cabe, disamping jagung dan semangka.

c. Aspirasi Kelompok Pengolah Sampah Kabupaten Mamuju

- 1) Kesadaran pengelolaan (pilih dan pilah) sampah mulai dari rumah masih sangat rendah. Mengingat armada sampah yang sangat terbatas, maka terjadi surplus sampah (terutama sampah plastik) di Kabupaten Mamuju.
- 2) Perlu dukungan armada pengangkut sampah di Kabupaten Mamuju, untuk mengurangi timbunan sampah yang tersebar di seluruh pelosok/wilayah.
- 3) Perlu dukungan pembangunan Tempat Pengumpulan Sementara *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) yang menampung sampah organik yang dihasilkan oleh pasar dan selanjutnya melakukan pengolahan sampah organik menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

d. Aspirasi Kelompok Nelayan dan Petambak Kabupaten Mamuju

- 1) Kegiatan penangkapan ikan dan tambak udang sangat baik, namun tambak udang agak terganggu akibat bencana alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
- 2) Perlu dukungan bantuan excavator untuk kegiatan tambak udang.

e. Penyampaian Informasi Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

- 1) 1 orang menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kg per hari, Dimana 47% diantaranya merupakan sampah organik.
- 2) Perlu didorong untuk merubah mindset masyarakat dalam mengelola sampah (memilah sampah dari rumah dan mengolah sampah

menjadi barang dengan nilai ekonomi tinggi), walaupun dukungan sarana prasarannya sangat baik.

- 3) Perlu sosialisasi kepada masyarakat secara massif untuk memilah sampah dari rumah, disamping adanya dukungan Pembangunan Bank Sampah yang akan menampung dan mengelola sampah rumah tangga.
- 4) Selanjutnya perlu dipilih beberapa kecamatan yang akan dijadikan *pilot project* pengelolaan sampah, dimana pengolahan sampah organik dilakukan di rumah dengan menggunakan biopori dan komposter.
- 5) Disarankan untuk mengusulkan DAK Bidang Lingkungan Hidup untuk pengadaan mesin pencacah sampah organik yang dapat dijadikan sumber bahan baku magot serta sampah cair organik, yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

f. Tanggapan Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk menindaklanjuti temuan dan hal-hal yang menjadi masukan dan aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

3. Kunjungan dan Diskusi di Tempat Pengumpulan Sampah Adi-adi

a. Penyampaian Informasi Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

- 1) Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil melaksanakan pengolahan sampah plastik menjadi *paving block* serta produk bernilai ekonomi tinggi lainnya. Dalam hal ini Kabupaten Mamuju memiliki potensi sampah bernilai ekonomi tinggi berupa sampah plastik yang masih berserakan dan belum dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat.
- 2) Sosialisasi yang masif sangat penting karena sampah merupakan masalah bersama yang sangat krusial.

3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun bersama Komisi IV DPR RI telah memberikan berbagai program bantuan untuk pengelolaan sampah. Dari data yang ada, Kabupaten Mamuju telah memperoleh bantuan kendaraan berupa *dump truck* dan motor tiga roda, serta bantuan untuk pengolahan limbah rumah tangga dan industri kecil rumah tangga.

b. Penyampaian Informasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju

- 1) Diharapkan Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun dapat membantu pengembangan TPA Adi-adi yang saat ini sudah mulai *over capacity* dan diperkirakan tidak dapat lagi menampung sampah untuk dalam sampai tiga tahun ke depan. Areal TPA yang tersedia saat ini (sepuluh), menginta saat ini areal dimanfaatkan baru mencapai 0,84 hektar.
- 2) Volume sampah yang ditampung di TPA Adi-adi mencapai 20 hingga 30 ton per hari, dan belum terdapat sarana pengolahan lanjutan untuk mendaur ulang sampah.

c. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan perhatian lebih kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia, mengingat potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar akibat tidak baiknya pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri.
- 2) Komisi IV DPR RI memandang pentingnya sosialisasi mengenai masalah sampah kepada masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah guna mengurangi tumpukan sampah di Kabupaten Mamuju. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat

Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan kelompok pemuda, kelompok Perempuan, dan kelompok lainnya dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar pengelolaan sampah menjadi gaya hidup, mulai dari pemilihan dan pemilahan sampah di rumah hingga pemanfaatan sampah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menggerakkan ekonomi sirkular di Kabupaten Mamuju.

- 3) Lebih lanjut Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya studi banding oleh Dinas lingkungan Hidup serta Wakil Kelompok Masyarakat Kabupaten Mamuju ke daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah serta menggerakkan ekonomi sirkular di daerahnya.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan anggaran pengelolaan sampah serta mencari alternatif pendanaan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pengelolaan Lingkungan serta dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dengan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 5) Komisi IV DPR RI sepakat bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Komisi IV DPR RI mendorong adanya intervensi dari Perum Bulog agar tidak hanya melakukan penyerapan produk beras petani, namun diharapkan Perum Bulog dapat juga menyerap komoditas jagung yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Mamuju, minimal seharga Rp5.000,00/kg, sebagaimana Harga

Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas jagung yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional.

- B. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar target Program Perluasan Areal Tanam Padi di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditingkatkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar target pencetakan sawah baru di Provinsi Sulawesi Barat dapat diperluas ditingkatkan, minimal seluas 10.000 hektar.
- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memberikan bantuan fasulitasi alat berat berupa excavator untuk melakukan pengerukan waduk yang mengalami pendangkalan.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan perhatian lebih kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia, mengingat potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar akibat tidak baiknya pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah industri.
- E. Komisi IV DPR RI memandang pentingnya sosialisasi mengenai masalah sampah kepada masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah guna mengurangi tumpukan sampah di Kabupaten Mamuju. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun untuk bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju melakukan sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan kelompok pemuda, kelompok Perempuan, dan kelompok lainnya dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar pengelolaan sampah menjadi gaya hidup, mulai dari pemilihan dan pemilahan sampah di rumah hingga pemanfaatan sampah yang memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka menggerakkan ekonomi sirkular di Kabupaten Mamuju.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong dilakukannya studi banding oleh Dinas lingkungan Hidup serta Wakil Kelompok Masyarakat Kabupaten Mamuju ke daerah atau kabupaten/kota yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan sampah serta menggerakkan ekonomi sirkular di daerahnya.

- G. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk meningkatkan anggaran pengelolaan sampah serta mencari alternatif pendanaan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Mamuju, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pengelolaan Lingkungan serta dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- H. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi untuk melakukan penyempurnaan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah yang lebih baik di Indonesia.
- I. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perum Bulog dan PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk menindaklanjuti temuan dan hal-hal yang menjadi masukan dan aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 5 Maret 2024

Ketua Tim/
Anggota Komisi IV DPR RI

Ttd.

Dr. H. Suhardi Duka, M.M.

A-574

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Pelaksanaan Program Perluasan Areal Tanam Padi Kabupaten Mamuju



Diskusi di Rumah Jabatan Bupati Mamuju Sapota



Kunjungan dan Diskusi di Tempat Pengumpulan Sampah Adi-adi

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50603/t/Komisi+IV+dan+Masyarakat+Mamuju+Berdialog+Bahas+Solusi+Konkret+untuk+Sektor+Pertanian-LHK>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50628/t/Kunjungi+TPA+Adi->

[Adi+Mamuju%2C+Komisi+IV+Dorong+Pengelolaan+Sampah+yang+Lebih+Baik](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50628/t/Kunjungi+TPA+Adi-Mamuju%2C+Komisi+IV+Dorong+Pengelolaan+Sampah+yang+Lebih+Baik)

<https://pemda.mamujukab.go.id/bupati-mamuju-menerima-kunjungan-kerja-reses-anggota-dpr-ri-komisi-iv-di-rumah-jabatan-bupati-sapota/>

<https://www.instagram.com/p/C9jlaUgyW8c/>

<https://dprd.sulbarprov.go.id/ketua-dprd-provinsi-sulawesi-barat-dr-hj-siti-suraidah-suhardi-mendampingi-kunjungan-kerja-anggota-dpr-ri-komisi-iv-dalam-rangka-kunjungan-kerja-reses-di-kab-mamuju-provinsi-sulawesi-barat/>

https://www.youtube.com/watch?v=R0G_VRES6F0

<https://www.youtube.com/watch?v=vHOF3q0Jzzw>

<https://www.youtube.com/watch?v=CNwk3moes3c>

<https://www.youtube.com/watch?v=3DhILycwBx4>

https://www.instagram.com/dpr_ri/reel/C9kNqEMyDLP/

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50630/t/Andi%20Akmal:%20Sosialisasi%20Pengelolaan%20Sampah%20di%20Mamuju%20Perlu%20Ditingkatkan>

LAMPIRAN MITRA PENDAMPING

INSTANSI	JABATAN/NAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, M.Si. 2. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Dr. RACHMAT, S.Si.,M.Si.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H.,M.Sc. 2. Kepala Badan Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. ARI SUDIJANTO, M.S.E. 3. Direktur Pengurangan Sampah Ditjen PSLB3 VINDA DAMAYANTI ANSJAR, S.Si., M.Sc.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya Dr. AGUS SUHERMAN 2. Direktur Kepelabuhanan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap Ir. TRI ARIS WIBOWO, M.Si.
BADAN PANGAN NASIONAL	<p>✓ Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dr. ANDRIKO NOTO SUSANTO, S.P., M.P.</p>
PERUM BULOG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur <i>Supply Chain</i> dan Pelayanan Publik MOKHAMAD SUYAMTO 2. Pimpinan Wilayah Sulawesi Barat AHMAD KHOLISUN 3. Manajer Kerjasama <i>Project Management Office</i> Mitra Tani NURHUDHA ZUS JULIANTO
ID FOOD/ HOLDING PANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Manajemen Risiko & Legal PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) S. HIDAYAT SAFWAN 2. Direktur Operasi dan Komersial PT Sang Hyang Sri FERRY 3. Direktur Operasional PT Perikanan Indonesia FAJAR WIDISASONO
PUPIK INDONESIA HOLDING COMPANY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Manajemen Resiko PT Pupuk Indoensia (Perseto) NINIS KESUMA ADRIANI 2. Senior Manager SULAMAPA PT Pupuk Indonesia (Persero) SUKODIM 3. SVP Transformasi Bisnis PT Pupuk Kalimantan Timur WISNU RAMADHANI